

Pemulihan ekonomi global tetap menjadi masalah yang genting, kebangkitan ekonomi di angka 4,7% hampir tidak mampu mengimbangi kerugian yang diderita pada tahun 2020

Menurut laporan baru PBB, kita perlu mendorong investasi, merevitalisasi perdagangan global dan mencegah pengetatan anggaran dini, gelembung ekonomi, serta melebarnya ketidaksetaraan demi pemulihan yang tangguh

New York, 25 Januari — Perserikatan Bangsa-Bangsa hari ini memperingatkan bahwa dampak kehancuran sosial ekonomi akibat pandemi COVID-19 akan dirasakan selama beberapa tahun mendatang kecuali jika ada investasi cerdas untuk ketahanan ekonomi, sosial dan iklim dalam rangka memastikan pemulihan ekonomi global yang kuat dan berkelanjutan.

Pada tahun 2020, ekonomi dunia menyusut sebesar 4,3 persen, lebih dari dua setengah kali lipat daripada yang terjadi pada krisis keuangan global tahun 2009. Pemulihan skala menengah sebesar 4,7 persen yang diharapkan pada tahun 2021 hampir tidak akan mengimbangi kerugian yang diderita pada tahun 2020, menurut laporan terbaru Situasi dan Prospek Ekonomi Dunia (*World Economic Situation and Prospects*).

Laporan tersebut menekankan bahwa pemulihan berkelanjutan dari pandemi akan bergantung tidak hanya pada seberapa besar langkah-langkah stimulus yang diterapkan dan seberapa cepat vaksin diluncurkan, tetapi juga bergantung pada kualitas dan keberhasilan langkah-langkah ini dalam membangun ketahanan terhadap berbagai guncangan di masa depan.

“Kita sedang menghadapi krisis kesehatan dan ekonomi terburuk dalam 90 tahun terakhir. Saat kita berduka atas meningkatnya jumlah korban yang berguguran, kita harus mengingat pula bahwa pilihan-pilihan yang kita buat sekarang akan menentukan masa depan kita bersama,” kata Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, yang akan berpidato di acara *Davos Agenda* hari ini.

“Mari berinvestasi dalam masa depan yang inklusif dan berkelanjutan, yang didorong oleh kebijakan yang cerdas, investasi yang berdampak, dan sistem multilateral yang kuat dan efektif yang menempatkan manusia sebagai bagian terpenting dari semua upaya sosial-ekonomi.”

Negara-negara maju, yang diproyeksikan mengalami pertumbuhan sebesar 4 persen pada 2021, paling banyak mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sebesar 5,6 persen akibat terhentinya roda perekonomian dan gelombang pandemi berikutnya. Hal ini meningkatkan risiko langkah-langkah pengetatan anggaran dini yang hanya akan menggagalkan upaya pemulihan secara global. Negara-

negara berkembang diperkirakan mengalami kontraksi yang tidak terlalu parah pada tingkat pertumbuhan 2,5 persen, dengan perkiraan kembali mengalami pertumbuhan sebesar 5,6 persen pada tahun 2021, menurut perkiraan yang disajikan dalam laporan tersebut.

Bidang-Bidang Utama yang Terdampak

Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB mengatakan bahwa 131 juta lebih orang jatuh ke lubang kemiskinan pada tahun 2020, banyak di antaranya adalah perempuan, anak-anak, dan orang-orang dari komunitas yang terpinggirkan. Pandemi telah menciptakan dampak buruk yang lebih parah terhadap perempuan dewasa dan anak perempuan, membuat mereka semakin berisiko mengalami kehancuran ekonomi, kemiskinan, kekerasan, dan buta huruf.

Lebih dari 50 persen angkatan kerja perempuan merupakan tenaga kerja berisiko tinggi dan berada pada sektor padat layanan, seperti ritel, perhotelan, dan pariwisata - yang merupakan bidang-bidang yang paling terkena dampak *lockdown*. Banyak dari mereka menghadapi keterbatasan akses atau bahkan sama sekali tidak dapat mengakses perlindungan sosial.

Langkah-langkah stimulus besar-besaran dan tepat waktu sebesar US \$ 12,7 triliun telah mencegah keruntuhan total ekonomi dunia dan terulangnya Depresi Besar. Namun, mengingat negara maju dan negara berkembang menggelontorkan dana untuk paket stimulus masing-masing dengan jumlah yang sangat timpang, tentunya jalan menuju pemulihan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang juga akan berbeda, menurut laporan tersebut.

Pengeluaran stimulus per kapita oleh negara-negara maju hampir 580 kali lebih tinggi dibandingkan negara-negara paling tidak berkembang, meskipun rata-rata pendapatan per kapita negara-negara maju hanya 30 kali lebih tinggi dari negara-negara paling tidak berkembang. Kesenjangan yang drastis ini menandakan perlunya solidaritas dan dukungan internasional yang lebih besar, termasuk keringanan utang, untuk kelompok negara yang paling rentan ini.

Selain itu, untuk mendanai paket stimulus ini diperlukan pinjaman pada masa damai terbesar, yang mana telah meningkatkan utang publik secara global sebesar 15 persen. Kenaikan utang yang sangat tinggi ini akan sangat membebani generasi mendatang kecuali sebagian besarnya disalurkan ke investasi yang produktif dan berkelanjutan, serta diarahkan untuk merangsang pertumbuhan.

Menurut laporan tersebut, perdagangan global menurun sekitar 7,6 persen pada tahun 2020 akibat disrupsi besar-besaran pada rantai pasokan global dan arus pariwisata. Ketegangan perang dagang yang berkepanjangan antara negara-negara ekonomi besar dan kebuntuan dalam negosiasi perdagangan multilateral selama ini memang telah membatasi perdagangan global bahkan sebelum muncul pandemi.

“Krisis saat ini menegaskan kembali pentingnya merevitalisasi sistem perdagangan multilateral berbasis aturan untuk menempatkan ekonomi dunia pada jalan pemulihan yang kuat dan tangguh,” kata Wakil Sekretaris-Jenderal Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB (UN DESA), Liu Zhenmin. “Kita harus menciptakan perdagangan global yang tahan terhadap guncangan untuk memastikan perdagangan tetap menjadi mesin pertumbuhan bagi negara-negara berkembang.”

Laporan tersebut menyoroti peluang bagi negara berkembang jika mereka dapat memprioritaskan investasi yang memajukan pembangunan manusia, merangkul inovasi dan teknologi, dan memperkuat infrastruktur, termasuk menciptakan rantai pasokan yang tangguh.

Menekankan pentingnya stimulasi investasi, laporan tersebut menunjukkan bahwa di saat sebagian besar pengeluaran stimulus digunakan untuk melindungi lapangan kerja dan mendorong konsumsi saat ini, di

saat yang sama stimulus ini juga memicu gelembung harga aset di seluruh dunia, di mana indeks pasar saham mencapai level tertinggi baru selama beberapa bulan terakhir.

“Kedalaman dan keparahan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya ini menunjukkan pemulihan yang lambat dan menyakitkan,” kata Kepala Ekonom PBB dan Asisten Sekretaris-Jenderal untuk Pembangunan Ekonomi Elliott Harris. “Saat kita melangkah menuju fase pemulihan yang panjang melalui peluncuran vaksin COVID-19, kita perlu mulai meningkatkan investasi jangka panjang yang memetakan jalan menuju pemulihan yang lebih tangguh - disertai dengan langkah-langkah fiskal untuk menghindari pengetatan anggaran dini, melakukan pengaturan ulang kerangka kerja keberlanjutan utang, menciptakan skema perlindungan sosial universal, dan mempercepat transisi menuju ekonomi hijau.”

Krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya ini - yang telah menggugurkan lebih dari 2 juta nyawa manusia dan akan lebih banyak lagi, mendorong banyak rumah tangga jatuh ke dalam lubang kemiskinan, memperparah ketimpangan pendapatan dan kekayaan antar masyarakat, mengganggu perdagangan internasional dan melumpuhkan ekonomi global - membutuhkan respons yang luar biasa. Pada akhirnya, laporan tersebut menggarisbawahi pentingnya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan - sebuah cetak biru untuk dunia yang adil, damai, dan tangguh.

“Mendorong pertumbuhan yang inklusif dan adil, memangkas ketimpangan dan meningkatkan kelestarian lingkungan adalah rencana terbaik yang kita miliki, baik untuk pulih dari krisis ini maupun melindungi dunia dari krisis di masa depan. Pembangunan ketahanan harus menjadi acuan dari setiap aspek pemulihan dan kita akan melihat bagaimana perempuan memainkan peran penting berkat ketahanannya yang luar biasa,” tambah Maria-Francesca Spatolisano, Asisten Sekretaris-Jenderal UN DESA untuk Koordinasi Kebijakan dan Urusan Antar-Badan.

Tentang Situasi dan Prospek Ekonomi Dunia 2021 | #LaporanEkonomiDunia

Situasi dan Prospek Ekonomi Dunia 2021 adalah laporan yang dibuat oleh Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB (*Department of Economic and Social Affairs/DESA*), bekerja sama dengan Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (*United Nations Conference on Trade and Development/UNCTAD*), dan lima komisi regional PBB. Organisasi Pariwisata Dunia PBB juga berkontribusi pada laporan tersebut. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi: www.bit.ly/wespreport

Kontak media:

Devi Palanivelu, Departemen Komunikasi Global PBB, palanivelu@un.org

Helen Rosengren, Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB, rosengrenh@un.org